



**RILIS KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA PENINJAUAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
TUGU SELATAN MANDIRI, KABUPATEN BOGOR**

=====

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik ke Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dalam rangka meninjau Bumdesa Tugu Selatan Mandiri, pada tanggal 23 Agustus 2024. Kunjungan ini dipimpin oleh Bapak Roberth Rouw dan dihadiri oleh beberapa anggota Komisi V DPR RI; pejabat dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; pejabat dari Dinas PMD Kabupaten Bogor; Kepala Desa Tugu Selatan; pengurus Bumdesa dan tenaga pendamping desa.

Fokus utama Kunjungan Kerja ini adalah melihat secara langsung pengelolaan Bumdesa Tugu Selatan Mandiri untuk memperkuat penataan kehidupan ekonomi dan investasi di desa. Bumdesa ini berada di lahan kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, dekat dengan lokasi landing paralayang. Di Lokasi Bumdesa ini dibangun café dan pujasera untuk belasan pelaku UMKM dari Desa Tugu Selatan menjajakan dagangannya. Setiap hasil penjualan para pedagang wajib menyisihkan 20 persen untuk BUMDesa.

Dalam menjalankan usahanya, Bumdesa ini memiliki 2 (dua) jenis unit usaha, yaitu Desa Wisata (dengan kegiatan traking, berkuda tubing dan kuliner di kampung Texas yang bekerjasama dengan PTPN VIII Reg. 2 dan PT. Mayora) dan Pangrango *Vibes* dengan bentuk usaha pelayanan penyedia internet desa. Dari usahanya ini Bumdesa telah memberikan kontribusi terhadap PADes sebesar 25 % dan kontribusi sosialnya sebanyak 10 %. Berdasarkan data dari Dinas PMD Kabupaten Bogor, Bumdesa Tugu Selatan Mandiri telah berstatus sebagai Bumdesa berkembang dan akan terus ditingkatkan usaha bisnis dan pengelolaannya.

Dalam Kunjungan Spesifik tersebut, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melakukan monitoring secara komperhensif terhadap seluruh Bumdesa untuk mengecek laporan keuangan Bumdesa agar aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan Bumdesa tetap terjaga. “Suntikan modal ke Bumdesa dari APBDes perlu dievaluasi per tahun agar dikelola dengan benar dan transparan”, tegas Ketua Tim Komisi V DPR RI. Selain itu, dalam rangka memperkuat pengelolaan Bumdesa, perlu dilakukan peningkatan pelatihan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Sementara Kepala Desa Tugu Selatan mengatakan bahwa Bumdesa ini mulai berkembang sejak tahun 2020. “Kita memulai Bumdesa ini dengan beban utang 38 juta dari pemerintah desa sebelumnya”, katanya. Selain itu, Kepala Desa Tugu Selatan sangat mengharapkan dukungan Bantuan Program Desa Wisata dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar pengembangan wisata di desa ini semakin maju. Ke depan diharapkan, Bumdesa juga dapat mengelola tenant yang ada di rest area Cisarua dan beberapa usaha lainnya.

Bogor, 23 Agustus 2024

Tim Kunsfik ke Kab. Bogor